

Judul : Pengguna pertamax beralih ke pertalite harus dicegah
Tanggal : Senin, 01 Agustus 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Stok SPBU Sering Kosong

Pengguna Pertamina Beralih Ke Pertalite Harus Dicegah



Rofik Hananto

Senayan berharap distribusi BBM subsidi kian membaik dan tepat sasaran. Sebab, BBM subsidi sangat terbatas volumenya, sehingga butuh regulasi yang memadai.

ANGGOTA Komisi VII DPR Rofik Hananto meminta revisi Perpres Nomor 191 tahun 2014 harus dapat memperbaiki distribusi BBM pengisian seperti Pertalite dan solar bersubsidi. Selama ini, Pertalite dan solar merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Pengisian (JBKP) yang distribusinya diatur dan diawasi oleh BPH Migas.

"Saat ini stok Pertalite di

banyak SPBU sering kehabisan, karena pergeseran penggunaan BBM dari Pertamina ke Pertalite," ujar Rofik dalam keterangannya, kemarin.

Karena sering kehabisan stok, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mengalami antrian panjang saat Pertalite sudah tersedia. Selain itu, kebijakan Pertamina mewajibkan pembelian Pertalite dengan

aplikasi *MyPertamina* per 1 Agustus 2022 untuk kendaraan roda empat membuat masyarakat panik.

Politikus PKS ini menuturkan, bila dilihat pergerakan harga minyak mentah dunia, khususnya *Brent* yang jadi acuan biaya pengadaan BBM, trennya memang meningkat. Sejak 24 Februari 2022 ketika Rusia menyerang Ukraina, harga terus berada di level baru yang lebih tinggi.

"Memang terjadi lonjakan sesaat di awal perang dan fluktuatif naik turun selama be-

perjelas proses pengalokasian, pendistribusian, penjualan sampai harga di tingkat pengguna. Alokasi ini menyangkut angka, jumlah volume, siapa penerimanya, nilai subsidi dan data dasarnya harus jelas.

"Apakah diambil dari jumlah penduduk, jumlah kendaraan, atau berdasarkan hitungan hasil penelitian. Sebab, angka ini yang akan dijadikan dasar untuk menghitung angka subsidi," ujar Bambang dalam keterangannya, kemarin.

Bambang menambahkan, komponen yang juga penting

dalam regulasi BBM adalah soal harga. Komponen harga adalah unsur yang harus dituangkan dalam perubahan Perpres ini, agar masyarakat mendapatkan kepastian harga.

Dunia usaha juga punya kepastian berusaha. Pada akhirnya, BBM subsidi bisa diakses oleh kelompok yang berhak dengan tepat sasaran.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, selama ini Pemerintah selalu menjamin adanya BBM, tapi harus tepat sasaran. Yaitu dengan membatasi pembelian Solar dan Pertalite.

"Maksud subsidi BBM bisa memberikan energi ini kepada masyarakat yang daya belinya rendah," ujar Arifin.

Selain menjaga pasokan dengan pembatasan pembelian, kata Arifin, Pemerintah juga akan menerapkan aturan dalam revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang akan terbit Agustus mendatang. ■ TIF

DPR - RI